



FDG Kajian Rekomendasi Strategi Pembangunan Kualitas Keluarga

Topik:

**Kebutuhan, Respons dan Harapan untuk
Memastikan Kualitas Keluarga dalam
Konteks Masyarakat Adat**

Qurrota Ayun, S.Si, MPH

**Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak.
Kementerian PPN/Bappenas**

Jakarta, 27 Oktober 2026

AGENDA DAN ARAH PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

TRANSFORMASI INDONESIA

Transformasi Sosial

- IE1 Kesehatan untuk Semua
- IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
- IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Transformasi Ekonomi

- IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
- IE6 Transformasi Digital
- IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- IE8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Transformasi Tata Kelola

- IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

LANDASAN TRANSFORMASI

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
- IE11 Stabilitas Ekonomi Makro
- IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
- IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
- IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

- Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

KERANGKA KONSEP INDONESIA EMAS 14: KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF



ARAH KEBIJAKAN KELUARGA BERKUALITAS DALAM RPJPN 2025-2045



PENINGKATAN KETANGGUHAN INDIVIDU, KELUARGA, DAN MASYARAKAT

untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan

- Peningkatan ketahanan keluarga** termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga;
- Pemenuhan hak dan perlindungan** anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan;
- Pemberdayaan** perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan
- Penyediaan lingkungan pendukung** bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia.



PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN INKLUSI SOSIAL

untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*)

- Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial** dalam proses pembangunan secara komprehensif;
- Penguatan kebijakan afirmasi** untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan
- Penguatan lingkungan strategis** untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan pengetahuan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengembangan mekanisme insentif, dan pelibatan *vibrant community*

**I.E.
KELUARGA
BERKUALITA
S,
KESETARAA
N GENDER,
DAN
MASYARAK
AT INKLUSIF**

"Setiap individu hidup sejahtera dalam keluarga yang tangguh dan lingkungan sehat"

ARAH DAN INTERVENSI KEBIJAKAN KELUARGA BERKUALITAS DALAM RPJMN 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL 4:

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas



PP Peningkatan ketangguhan keluarga diarahkan untuk memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal, menjadi wadah sosialisasi antar generasi dan kontrol sosial bagi seluruh anggotanya, serta memiliki resiliensi dalam menghadapi perubahan dan konflik, melalui:

- ❖ **Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak;**
- ❖ **Penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga; dan**
- ❖ **Pemenuhan hak sipil dan hukum, serta afirmasi bagi keluarga rentan.**

CASCADING PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KETANGGUHAN KELUARGA PADA RPJMN 2025-2029

PN dan Indikator PN

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Indikator:

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)

Program Prioritas (PP) dan Indikator PP

Peningkatan Ketangguhan Keluarga

Indikator:

Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Kegiatan Prioritas (KP) dan Indikator KP

KP 01 Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak

1. Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini
2. Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja
3. Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah
4. Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja

KP 02 Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga

1. Persentase pusat layanan keluarga yang terjangkau
2. Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan

KP 03 Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan

1. Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga
2. Indeks Kerentanan Keluarga

Proyek Prioritas (ProP)

ProP 1 Penyiapan Kehidupan berkeluarga

ProP 2 Penguatan Kualitas Pengasuhan dalam Keluarga

ProP 3 Peningkatan pemahaman dan kapasitas keluarga dalam menjalankan fungsinya

ProP 1 Penyediaan fasilitas dan lingkungan pendukung keluarga

ProP 2 Pusat layanan konsultasi dan konseling keluarga

ProP 1 Pemenuhan hak sipil dan hukum bagi keluarga

ProP 2 Penguatan keluarga rentan dan pemberdayaan ekonomi keluarga

UPAYA PENINGKATAN KETANGGUHAN KELUARGA DI TAHUN 2025-2029

Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak

1. **Penyiapan Kehidupan Berkeluarga**, memastikan kesiapan calon pengantin melalui pembinaan, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian edukasi pra nikah untuk dapat mengetahui nilai-nilai penting yang perlu diimplementasikan dalam berkeluarga.



2. **Penguatan Kualitas Pengasuhan dalam Keluarga**, untuk membekali keluarga dalam memberikan pengasuhan layak pada anak melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, KIE, pedoman, pembinaan, pendampingan, pelibatan tokoh agama/masyarakat, dsb.



3. **Peningkatan pemahaman dan kapasitas keluarga dalam menjalankan fungsinya**, untuk penguatan fungsi keluarga melalui berbagai hal seperti kajian, bimtek, KIE, regulasi, pendampingan serta komunikasi publik.



Peningkatan Ketangguhan Keluarga

Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga

1. **Penyediaan fasilitas dan lingkungan pendukung keluarga**, untuk mewujudkan lingkungan yang mampu mendukung keluarga dalam menjalankan fungsinya seperti penyediaan layanan taman bermain dan daycare yang mendukung pengasuhan bagi ibu bekerja.
2. **Pusat layanan konsultasi dan konseling keluarga**, dibutuhkan dalam rangka penyediaan layanan penanganan konflik yang terjadi di dalam keluarga dimana layanan tersebut bersifat preventif, memberikan solusi, pendampingan, dan pengurangan risiko terhadap rumah tangga yang terindikasi sedang dalam konflik, indikasi KDRT, pengasuhan tidak yang layak, serta penelantaran.



Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan

1. **Pemenuhan hak sipil dan hukum bagi keluarga**, memastikan setiap anggota keluarga terjamin hak sipil dan hukumnya melalui kepemilikan dokumen sipil dan layanan hukum yang ada.
2. **Penguatan keluarga rentan dan pemberdayaan ekonomi keluarga**, dilakukan dengan program pemberdayaan melalui pembinaan, pendampingan, pelatihan, pengembangan industri rumah tangga, untuk membantu keluarga keluar dari kerentanan.



KAJIAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA



Urgensi

1. Pembangunan Keluarga merupakan **salah satu isu prioritas** di dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.
2. Kontribusi **Rincian Output (RO)** K/L dalam upaya Pembangunan Keluarga masih **terbatas**.
3. **Belum tersedianya strategi pembangunan keluarga secara komprehensif** yang menjadi acuan bersama dalam pencapaian indikator yang ditetapkan.
4. Perlunya mengkaji pelaksanaan pembangunan keluarga yang telah ada dan **menemukenali kesenjangan** sebagai input penyusunan rekomendasi kebijakan



Tujuan

- Memetakan **kebijakan, program, layanan, serta pemangku kepentingan** terkait pembangunan keluarga yang telah berjalan lintas sektor, serta mengidentifikasi ruang penguatan koordinasi dan integrasi kebijakan.
- Melakukan **analisis dan penajaman terhadap kebijakan, program, dan mekanisme dukungan keluarga** yang telah berjalan agar lebih adaptif terhadap dinamika dan tantangan pembangunan keluarga kontemporer.
- Menyusun **rekomendasi strategi pembangunan keluarga yang responsif, inklusif, dan berbasis bukti** sebagai input substantif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional periode selanjutnya.



K/L dan Stakeholder Terkait

Kemenko PMK; Kemendukbangga/BKKBN; KemenPPPA; Kemenag; Kemendikdasmen; Kemensos; Kemendagri; MA; Kemenkes; Kemendes PDT; BNN; KP2MI/BP2MI; Pemda; Akademisi; Mitra Pembangunan dan Lembaga non pemerintah



Ruang Lingkup Kajian

- Kajian dan analisis awal (*desk review*)
- Pemetaan kebijakan, program, dan layanan lintas sektor
- Penggalan perspektif pemangku kepentingan
- Diskusi validasi dan penyelarasan pemangku kepentingan
- Perumusan rekomendasi strategi implementasi



Pendekatan Kajian

- Analisis dokumen dan kebijakan
- Pendekatan kualitatif (wawancara mendalam dan FGD)
- Pendekatan lintas sektor



Output

Rekomendasi kebijakan penguatan kebijakan dan strategi pembangunan Keluarga

TIMELINE KAJIAN

START

JULI

- Koordinasi awal dengan K/L
- *Desk study* dan reviu kebijakan

AGUSTUS

- *Desk Study* dan Reviu kebijakan (*lanjutan*)
- Wawancara mendalam (IDI) dan FGD lintas sektor (validasi awal & pengayaan temuan)
- Laporan Pendahuluan

SEPTEMBER

- **Wawancara mendalam (IDI) dan FGD lintas sektor** (validasi awal & pengayaan temuan) (*lanjutan*)
- Kunjungan lapangan (*field visit*)

DESEMBER

- Penyusunan laporan akhir (*lanjutan*)
- Diseminasi Hasil

NOVEMBER

- Analisis & perumusan rekomendasi
- Penyusunan laporan akhir

OKTOBER

- FGD dan Kunjungan lapangan (*field visit*) (*lanjutan*)
- Analisis & perumusan rekomendasi
- Laporan Antara

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
09.30 – 09.45	Pembukaan dan paparan mengenai Kajian Penyusunan Rekomendasi Pembangunan Kualitas Keluarga	Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak, Bappenas
09.45 – 10.15	Dukungan Program dan Kegiatan Pembangunan Kualitas Keluarga, termasuk Masyarakat Adat	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan RIset dan Inovasi Daerah, Kab. Lebak 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Lebak
10.15 – 10.30	Pengantar diskusi kelompok	Ni Luh Agastya, Puskapa UI
10.30 – 12.15	Diskusi terfokus: - Analisis situasi kehidupan keluarga masyarakat adat dan keluarga secara umum di Kab. Lebak - Implementasi praktik baik program keluarga untuk masyarakat adat - Respons pemda, lembaga non pemerintah, dan komunitas terhadap situasi kehidupan keluarga masyarakat adat dan keluarga secara umum, misalnya kebijakan, program, dan kegiatan - Celah kebijakan dan program yang belum dilakukan	Mekanisme: - Diskusi kelompok akan dipandu oleh fasilitator. - Fasilitator akan memberikan pertanyaan – pertanyaan pemantik diskusi - Peserta dapat memberikan pandangan, ide, evaluasi, validasi, dan masukan terhadap substansi yang disampaikan pada tiap kelompok - Hasil diskusi akan dicatat dan direkap sebagai data kajian. Fasilitator: Tim Kajian Kualitas Keluarga (Bappenas dan Puskapa UI)
12.15 – 15.30	Penutupan	Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak, Bappenas

TERIMA KASIH